

Recived : 29 September 2024

Revised: 29 Oktober 2024

Accepted: 30 November 2024

Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Dasar: Implementasi, Hambatan, Dan Strategi

Nainggolan Risnawati¹; Murniarti Erni²

¹²Universitas Kristen Indonesia

E-mail: 2501198003@ms.uki.ac.id

Abstract

Pendidikan inklusi merupakan kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk memastikan semua siswa, termasuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, dapat belajar bersama dalam lingkungan sekolah reguler. Artikel ini mengkaji implementasi kebijakan pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar, dengan fokus pada aspek implementasi, hambatan yang dihadapi, serta strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Melalui tinjauan literatur dari berbagai sumber ilmiah, artikel ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusi memerlukan dukungan dan kerja sama dari pemerintah, pihak sekolah, dan masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan berupa pendanaan bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Selain itu, pemerintah mengadakan pelatihan dan pembinaan untuk kepala sekolah dan guru supaya memahami pendidikan inklusi. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Hambatan utama meliputi kurangnya sumber daya, stigma sosial, dan kesiapan sekolah. Strategi yang diusulkan dalam artikel ini mencakup pengembangan kurikulum adaptif, akomodasi dalam proses pembelajaran, dan evaluasi berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman praktis untuk meningkatkan efektivitas pendidikan inklusi di Indonesia.

Keyword: Inclusive Education, Policy Implementation, Elementary School;

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai utama yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diterapkan dalam kerangka konstitusional Indonesia. Fokus penelitian ini adalah bagaimana lembaga negara berfungsi untuk menerapkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, izin kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia melalui organisasi, kewenangan, dan interaksi mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur dan analisis dokumen. Sampel yang dipilih secara purposif terdiri dari pasal-pasal yang relevan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip konstitusional diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, populasi penelitian mencakup semua undang-undang dan norma konstitusional yang berkaitan dengan administrasi negara. Hasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945 telah menghasilkan penguatan lembaga negara dan kewenangan yang lebih besar.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Implementasi Kebijakan, Sekolah Dasar;

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan kesempatan belajar bagi seluruh anak, termasuk bagi anak – anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah reguler. Pemerintah memastikan setiap peserta didik di sekolah reguler, tidak memandang perbedaan, baik itu secara fisik, intelektual, emosional, maupun sosial. Hal tersebut sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia, seperti: UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pendidikan inklusif telah diimplementasikan secara nasional, akan tetapi masih banyak tantangan yang dihadapi. Menurut Sharma dan Sokal (2020), masalah utama dalam menerapkan pendidikan inklusif adalah kurangnya kepercayaan dan keterampilan guru dalam mengajar siswa yang memiliki kebutuhan khusus, serta kurangnya bantuan profesional dan alat yang tersedia di sekolah. Seperti yang terjadi di salah satu sekolah swasta di Jakarta Barat yang menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus, tetapi para guru tidak dibekali kemampuan untuk menangani peserta didik tersebut.

Para guru mengalami kendala dalam melaksanakan proses pembelajaran bagi anak – anak yang berkebutuhan khusus. Para guru harus menyiapkan materi menggunakan metode yang berbeda agar semua peserta didik dapat memahami materi yang dipelajari. Selain itu, ketersediaan guru yang mendampingi anak berkebutuhan khusus di sekolah tidak tersedia. Sehingga guru kadang terlalu fokus ke salah satu anak sehingga ada yang terabaikan.

Hambatan lain yang kerap muncul adalah keterbatasan dukungan dari pemerintah daerah dalam hal pendanaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan inklusif. Banyak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang belum mendapatkan pendampingan teknis secara rutin dari instansi terkait. Akibatnya, pelaksanaan pendidikan inklusif cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial seperti adaptasi kurikulum, evaluasi pembelajaran, serta kolaborasi antara guru reguler dan guru pendamping khusus.

Namun demikian, terdapat pula berbagai strategi yang dapat ditempuh untuk memperkuat implementasi kebijakan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar. Di antaranya melalui peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan fasilitas belajar yang adaptif, pembentukan tim inklusif di tingkat sekolah, serta penguatan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan agar tercipta sistem pendidikan yang benar-benar inklusif dan berkeadilan bagi semua peserta didik.

Oleh karena itu, analisis mengenai kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan, berbagai hambatan yang dihadapi di lapangan, serta strategi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.

METODE PENELITIAN

Analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis library reseach (kajian kepustakaan). Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami kehidupan sosial sebagaimana adanya, bukan sesuai dengan yang seharusnya. Penulis yang menggunakan kualitatif perlu memiliki sikap terbuka terhadap berbagai pandangan. Dengan melakukan pendekatan kualitatif secara benar, seseorang dapat melihat lebih dalam dunia psikologi dan realitas sosial.

Proses yang dilakukan oleh penulis dalam pendekatan kualitatif adalah mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data secara spesifik dari peserta, menganalisis data secara induktif yaitu dari hal-hal yang spesifik lalu menggeneralisasi, serta memberikan penjelasan atas makna yang terkandung dalam data tersebut. Menurut Mukhadis, Ibnu, dan Dasna (2003), pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara menyeluruh dan menggambarkan bentuknya dengan menggunakan kata-kata dan bahasa, dalam konteks alamiahnya.

Dalam analisis ini, penulis mengkaji lebih dari sepuluh hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik analisis ini. Jurnal ilmiah yang dijadikan sebagai bahan kajian literatur adalah jurnal yang sudah terindeks oleh sinta. Metode kajian kepustakaan ini dapat digunakan untuk menyusun kerangka sebuah penyelesaian Ketika menghadapi sebuah permasalahan. Metode ini juga dapat digunakan untuk menemukan sebuah teori baru.

PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Dasar

Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang dibuat agar semua anak dapat belajar, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, dengan cara mengajak mereka belajar bersama anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus dalam satu lingkungan belajar yang sama. Dari sudut pandang humanisme yang dipromosikan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow, setiap orang memiliki kemampuan alami untuk berkembang secara maksimal jika hidup dalam lingkungan yang peduli. Pendidikan inklusif mencerminkan gagasan ini dengan membuat tempat belajar yang menghargai keunikan dan kebutuhan setiap individu, serta mendorong rasa empati antar siswa.

Pemerintah memastikan setiap peserta didik di sekolah regular, tidak memandang perbedaan, baik itu secara fisik, intelektual, emosional, maupun sosial. Hal tersebut sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia, seperti: UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Sekolah formal diwajibkan untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023. Peraturan ini menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem yang memungkinkan semua siswa, termasuk yang memiliki kelainan atau bakat khusus, untuk belajar bersama dalam lingkungan sekolah biasa.

Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 juga menguraikan beberapa peranan yang dilakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah memberikan dukungan berupa anggaran untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung untuk peserta didik disabilitas. Selain itu, sekolah harus menyesuaikan kurikulum yang digunakan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusi merupakan Solusi bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus supaya merasa nyaman tanpa mengalami tekanan psikologis atas keadaan dirinya. Pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia harus memenuhi syarat untuk dapat menciptakan masyarakat yang menghargai dan menjunjung tinggi akan nilai – nilai kebhinekaan dalam kehidupan sehari – hari. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan inklusi harus menciptakan dan menghasilkan suasana belajar yang bersahabat, sehingga seluruh peserta didik dapat belajar dengan baik dan menyenangkan.

Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar

Program pendidikan inklusi di sekolah adalah kebersamaan siswa normal dan anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas dengan lingkungan dan layanan pendidikan yang sama. Kebersamaan ini dianggap mampu memberikan pengaruh positif yang sangat bermanfaat dalam mempersiapkan mereka untuk hidup dalam masyarakat. Di lingkungan masyarakat, mereka perlu dapat berinteraksi dengan berbagai orang dan beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. Oleh karena itu, mempersiapkan mereka sejak masa belajar di sekolah adalah hal yang penting dan wajib dilakukan. Meski ada perbedaan kemampuan dan hambatan, peserta didik normal dan anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama, seperti yang dikemukakan oleh Kadir (2015).

Pelaksanaan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar (SD) bukanlah hal mudah seperti melaksanakan pendidikan di sekolah umum. Ada banyak faktor yang harus diperhartikan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SD seperti: kurikulum yang fleksibel, tenaga pendidik yang profesional atau biasa disebut sebagai guru pembimbing khusus, lingkungan dan penyelenggara sekolah, sarana dan prasarana pendidikan, dan evaluasi pembelajaran. Seluruh faktor tersebut diupayakan untuk tersedia dengan baik, supaya proses pendidikan dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan inklusi pada Tingkat SD bersifat adaptif dan fleksibel. Kurikulum disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik. Cara

mengajar di sekolah inklusif menggunakan pendekatan diferensiasi, yaitu dengan menerapkan berbagai strategi dan alat bantu agar semua siswa bisa ikut serta dalam belajar. Contohnya, siswa yang kesulitan mendengar bisa menggunakan media visual, sedangkan siswa yang kesulitan berpikir bisa diberi instruksi bertahap dan waktu yang lebih banyak.

Guru merupakan fasilitator dan motivator dalam proses pendidikan. Guru yang melaksanakan pendidikan inklusi di tingkat SD harus bekerja sama dengan guru pendamping khusus dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu diberi pelatihan dan pendampingan untuk dapat meningkatkan kompetensi mengenai strategi pembelajaran inklusi, manajemen kelas, dan pendekatan kepada peserta didik.

Sarana dan prasarana perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di tingkat SD. Sarana dan prasarana harus memadai dan ramah untuk peserta didik yang melaksanakan pendidikan inklusi. Selain itu, dukungan dari seluruh kalangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi sangat berperan penting. Penyelenggara sekolah (kepala sekolah, guru, staf administrasi, dll) menjalin kerja sama dengan orang tua dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan inklusi di tingkat Sekolah SD.

Selain faktor – faktor yang diuraikan tersebut, ada prinsip yang harus dipahami dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Erni Murniarti (2016) menguraikan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusi harus memahami beberapa prinsip, yaitu: pendidikan yang ramah, pengembangan seoptimal mungkin, kerja sama, dan perubahan sistem. Hal itu perlu dipahami dengan baik sebab tidak semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merasa cocok untuk sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Hambatan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar

Victoria Yunus, dkk (2023) menguraikan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia belum maksimal. Ada beberapa masalah yang terjadi baik itu di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat pusat. Pada tingkat satuan pendidikan diakibatkan ketidak pahaman kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Sehingga banyak sekolah regular yang menolak untuk menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hal itu dikarenakan kurangnya fasilitas serta tidak adanya bantuan dari pemerintah untuk mengadakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di Tingkat SD merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Misalnya saja meja dan kursi yang digunakan dalam proses pembelajaran harus diperhatikan apakah kursi dan meja khusus yang lebih rendah atau lebih tinggi sesuai kebutuhan. Penggunaan alat dan media yang mendukung digunakan sehingga membantu peserta didik dalam memahami pembelajaran.

Masalah lainnya yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di tingkat SD adalah ketidak pahaman kepala sekolah dan guru. Belum tersedianya guru pendamping khusus yang melaksanakan pendidikan inklusi, sehingga guru reguler yang harus mendampingi ABK. Para guru reguler tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam menghadapi ABK, sehingga proses pembelajaran tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Penyelenggara sekolah (kepala sekolah dan guru) yang tingkat satuan pendidikannya melaksanakan pendidikan inklusi perlu diberi pembinaan dan pelatihan. Sehingga kepala sekolah dan guru dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Hal itu mengingat Standar Kurikulum Pendidikan Nasional (SKN) dan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang harus dicapai oleh setiap peserta didik.

Strategi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di tingkat SD perlu dipikirkan semua aspeknya supaya kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat terpenuhi dengan efektif dan efisien. Misalnya dari aspek kurikulum, peserta didik diberi isi kurikulum yang sama, namun untuk anak yang berkebutuhan khusus dilakukan dengan cara yang berbeda. Modifikasi model pembelajaran dapat

dilakukan melalui tugas, bentuk tes, lembar kerja, dan sebagainya sehingga anak yang berkebutuhan khusus dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat SD adalah akomodasi dalam proses pembelajaran. Seperti pencahayaan untuk ruangan kelas bagi anak yang berkebutuhan khusus, dikurangi atau ditambah tingkat cahayanya. Bisa juga dari posisi duduk peserta didik, dekat dengan papan tulis atau meja guru, ataupun harus jauh dari peserta didik lainnya. Hal – hal seperti itu harus diperhatikan dengan seksama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di tingkat SD

KESIMPULAN

Seluruh anak di Indonesia memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan, baik itu anak yang memiliki kebutuhan khusus. Kebijakan pendidikan inklusi pada sekolah dasar merupakan upaya strategis dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penyelenggaraan pendidikan inklusi harus memperhatikan berbagai aspek supaya berjalan dengan efektif dan efisien.

Pendidikan inklusi dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan kompetensi guru, belum optimalnya sarana prasarana pendukung, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan inklusif sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan kebijakan yang berkelanjutan, serta keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat. sehingga segala kendala dan hambatan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di tingkat SD.

Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Pemerintah memberikan bantuan berupa pendanaan bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Selain itu, pemerintah juga membuat pelatihan untuk kepala sekolah dan guru untuk memberikan pemahaman mengenai sekolah inklusi. Ketersediaan guru pendamping khusus di kelas yang memiliki peserta didik yang berkebutuhan khusus menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah. Guru pendamping khusus memiliki kompetensi dan keterampilan untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah juga menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Murniarti, E. (2025). Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan.
- Murniarti, E. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan.
- Murniarti, E., & Anastasia, N. Z. (2016). Pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar: konsep, implementasi, dan strategi. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 9(1), 9-18.
- Sibagariang, D., Sihotang, H., & Murniarti, E. (2021). Peran guru penggerak dalam pendidikan merdeka belajar di Indonesia. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 14(2), 88-99.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode penelitian kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Alfikri, F., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Journal of Syntax Literate*, 7(6).
- Yunus, V., Zakso, A., Priyadi, A. T., & Hartoyo, A. (2023). Pendidikan Inklusif Pada Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 9(2), 313-327.
- Arifin, F., Supena, A., & Yufiarti, Y. (2023). Praktik Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio Fkip Unma*, 9(1), 198-208.
- Karya, B. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar. Penerbit NEM.
- Jannah, A. M., Setiyowati, A., Lathif, K. H., Devi, N. D., & Akhmad, F. (2021). Model layanan pendidikan inklusif di Indonesia. *Anwarul*, 1(1), 121-136..